

SENGKETA BERSENJATA ANTARA ORGANISASI PAPUA MERDEKA DENGAN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

KEVIN AKBAR ALFIANTO

ABSTRAK

Sengketa bersenjata atau konflik bersenjata internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan maksud sebagai langkah terakhir terhadap perjanjian maupun kesepakatan yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian. Namun, hal ini tidak hanya terjadi diantara dua negara saja, sengketa bersenjata bisa saja terjadi didalam negara yang berdaulat serta memakan korban jiwa yang tidak terlibat dalam masalah dan jumlahnya cukup banyak. Tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk memisahkan diri serta membuat pemerintahan baru dapat merusak persatuan dan ketentraman negara. Sebagai pemegang kedaulatan serta kekuasaan tertinggi di suatu wilayah, negara merasa resah atas tindakan pemberontakan ini dan ingin segera diselesaikan dalam waktu yang singkat dan efektif agar tidak menyebar secara luas. Tindakan pemberontakan ini terjadi dikarenakan suatu kaum tertentu menganggap pemerintahan negara kurang memperhatikan terhadap rakyat di wilayah pemberontak atau dapat disebabkan karena adanya suatu ideologi untuk membuat pemerintahan baru bagi rakyatnya. Organisasi Papua Merdeka merupakan salah satu kelompok pemberontak di Indonesia yang berusaha untuk mengambil alih Irian Jaya dengan tujuan untuk menciptakan kedaulatan negara Papua Barat. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter atau sengketa bersenjata mengatur tata cara berperang suatu sengketa bersenjata non internasional serta analisis tentang bagaimana prospek hukum humaniter dalam mencari jalan keluarnya. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi Papua Merdeka tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum humaniter dikarenakan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi untuk menjadi suatu kelompok belligerent menurut hukum humaniter.

Kata Kunci : Sengketa Bersenjata, Konflik Bersenjata non Internasional, Organisasi Papua Merdeka, Hukum Humaniter

ARMED DISPUTES BETWEEN PAPUA MERDEKA ORGANIZATIONS AND TNI IN HUMANITER LEGAL PERSPECTIVES

KEVIN AKBAR ALFIANTO

ABSTRACT

Armed disputes or international armed conflicts are actions carried out by two or more countries with the intention of being the final step towards agreements that cannot be resolved peacefully. But this does not only happen between the two countries, the armed conflict could occur within a sovereign state and the casualties were not involved in the matter and is quite a lot. Actions carried out by a group or organization that aims to separate themselves and make a new government can damage the unity and peace of the country. As a sovereign and supreme power in a region, country feel worried over this act of rebellion and want to be resolved in a short time and effectively in order to not spread widely. This act of rebellion occurs because a certain group considers the government of the country to pay less attention to the people in the rebel territory or it can be caused by the existence of an ideology to create a new government for its people. The Free Papua Organization is one of the rebel groups in Indonesia that seeks to take over Irian Jaya with the aim of creating the sovereignty of the state of West Papua. The research used in this paper is a normative juridical research method, this study is also to find out how humanitarian law or armed disputes regulate the procedure to combat international non-armed disputes and analysis of how the prospects of humanitarian law find solutions. The results of this study are that the Free Papua Organization cannot be said to be the subject of humanitarian law because there are several criteria which are not met to become a belligerent group according to humanitarian law.

Key words: Humanitarian law, armed disputes, non-international armed conflict, the Free Papua Organization